

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN IDI TUNONG  
KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH**

**TESIS**

OLEH

**SULAIMAN IDRIS  
NPM. 111801074**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))29/9/25

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN IDI TUNONG  
KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**OLEH**  
**SULAIMAN IDRIS**  
**NPM. 111801074**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh**

**Nama : Sulaiman Idris**

**NPM : 111801074**

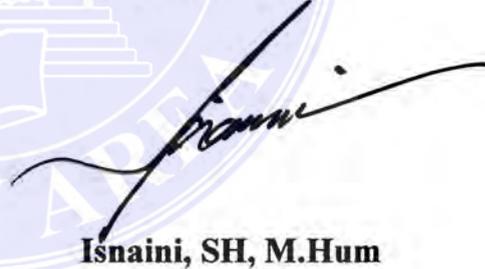
**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Warjio, MA**



**Isnaini, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Warjio, MA**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

**Telah diuji pada Tanggal 24 Mei 2013**

---

---

**Nama : Sulaiman Idris**

**NPM : 111801074**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**

**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum**

**Penguji Tamu : Drs. Usman Tarigan, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

## **PERNYATAAN KEORISINILAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Sulaiman Idris**

**NPM : 111801074**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

**“Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh”**

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 14 September 2013

Yang menyatakan,



**Sulaiman Idris**

## ABSTRAKSI

### STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN IDI KABUPATEN ACEH TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur; 2. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, dimana: a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Gampong Alue Lhok, Gampong Padang Kasah, Desa Seuneubok Buya, dan Desa Paya Awee; b) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur masih rendah. Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsure pembangunan dan unsur masyarakat mengenai perencanaan pembangunan.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Ciri-ciri perencanaan Partisipatif.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	17
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.4. Kegunaan Penelitian.....	18
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>19</b>
2.1. Pembangunan .....	19
2.2. Perencanaan.....	22
2.3. Perencanaan Pembangunan.....	25
2.4. Partisipasi masyarakat.....	28
2.5. Kerangka pikir studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur .....	45
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>47</b>
3.1. Rancangan Penelitian.....	47
3.2. Fokus Penelitian.....	49
3.3. Fenomena Pengamatan.....	49
3.4. Pemilihan Informan.....	50
3.5. Instrumen Penelitian.....	51
3.6. Pengumpulan Data .....	52
3.7. Analisa Data.....	53
 <b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	 <b>57</b>
4.1. Latar Belakang Kecamatan .....	57
4.2. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong .....	70
A.2. Keadaan Ekonomi .....	51
A.4. Tugas dan Fungsi Bagian Umum .....	53
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>73</b>
5.1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur .....	73
5.2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur .....	89
5.3. Legalitas Perencanaan.....	112
5.4. Pembahasan Hasil Penelitian .....	114

<b>BAB VI</b>	<b>:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>124</b>
		6.1. Kesimpulan .....	124
		6.2. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>			<b>128</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar.

Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1995 : 8) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan:

1

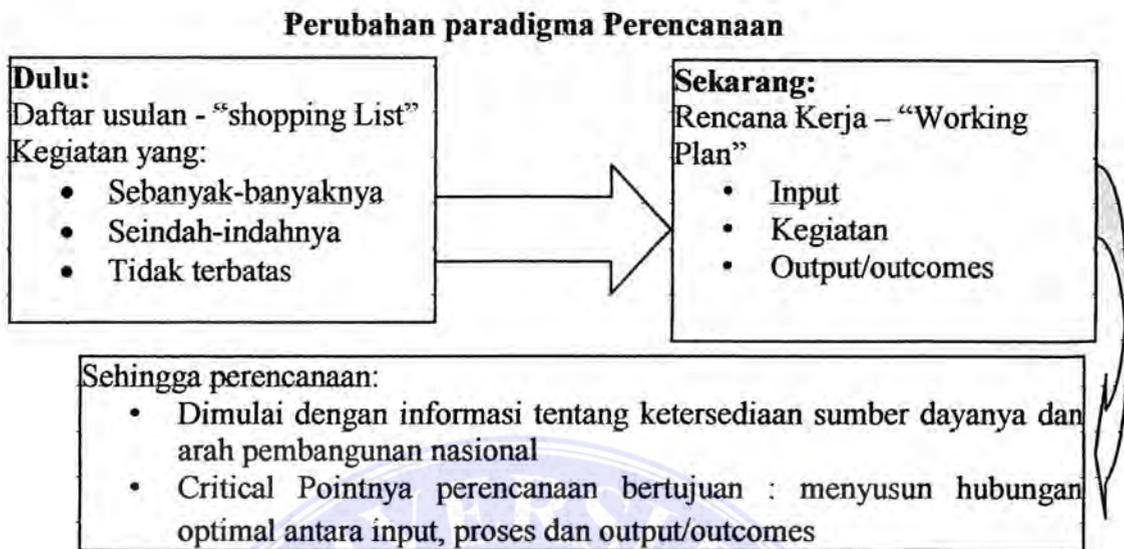
(1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan mendasar pada proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.1



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2004

Uraian tentang perubahan mendasar paradigma perencanaan diatas, intinya adalah proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang lama lebih menekankan daftar usulan dengan membuat “Shopping List” kegiatan sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya dan tidak terbatas, sehingga proses perencanaan pembangunan yang lama dianggap hanya sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan. Disamping itu proses perencanaan pembangunan sangat “powerfull” mulai dari perencanaan hingga penentuan anggaran, dengan kata lain proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara *Top Down* yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2

**Perencanaan Pembangunan Lama 2000-2004**



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2004

Dari gambar di atas, nampak bahwa proses perencanaan pembangunan sangat kental dengan nuansa *Top Down* karena semua dokumen perencanaan berasal dari pusat. Namun walaupun demikian masih dimungkinkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti yang terlihat dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang diadakan setiap tahun.

Proses perencanaan pembangunan sekarang lebih menekankan pada rencana kerja atau “working plan” sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan (proses); (3) Output/outcomes.

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk

menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, hal ini ditandai dengan diterapkannya maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam system pemerintahan di Indonesia, salah satu wujudnya adalah dengan diterapkannya

1. Undang-undang No. 32 tahun 2003 jo Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang “Pemerintahan Daerah”
2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang “Pedoman umum pengaturan mengenai Desa”
3. keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2002 tentang “peraturan Desa
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional”.
5. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut secara umum mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa/ gampong.
6. PP No 8 Tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengedahan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
8. Permendagri No. 66 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
9. PP No.72 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa wajib menyusun RPJM.

## 10. Surat Edaran Bupati Aceh Timur Nomor 600/609 Tanggal 09 Februari 2012 Tentang Penyelenggaraan Musrenbang Tahun Anggaran 2012.

Desa harus dikelola dengan memperhatikan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, sekaligus dengan memelihara kehidupan berdemokrasi di tingkat desa dalam pelaksanaannya, kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terbit Surat Edaran Bersama antara Kepala BAPPENAS dengan Medagri No. 0259/M. PPN/I/2005 /050/166/sj tanggal 20 Januari 2005 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 dari tingkat desa hingga Kabupaten/Kota. Ditingkat Kabupaten terbit Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemkab Aceh Timur.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat (4) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni:

#### 1. Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah. (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur. (2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. (3) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa / Gampong, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. (4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

#### 2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UUD ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA atau RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) daerah ditetapkan sebagai Pedoman Pembangunan.

### 3. Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan

Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pamantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### 4. Evaluasi Pelaksanaan rencana

Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Idi Tunong kabupaten Aceh Timur, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. Hal menarik tersebut antara lain: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi penulis ketika menghadiri kegiatan musbangdes di kecamatan Idi Tunong pada bulan Januari 2012, kegiatan Musbangdes dihadiri oleh perwakilan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Adat, Tokoh Agama serta Unsur dari Perempuan dalam Wilayah Kecamatan Idi Tunong namun yang tersiri dari 25 Desa, dan beberapa orang perwakilan masyarakat lainnya. Sebelum dilaksanakan musbangdes terlebih dahulu diselenggarakan musbangdus yaitu musyawarah pembangunan dusun untuk ditetapkan dalam Musyawarah Desa Kecamatan Idi Tunong. Masing-masing dusun menyerahkan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat ke kantor Desa sebelum penyelenggaraan musbangdes. Pada tahap musbangdes, aparat desa membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari masing-masing dusun, namun tidak mendiskusikan

kebutuhan mana yang dijadikan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada musrenbang tahapan selanjutnya. Pihak Desa lah yang memutuskan daftar kegiatan prioritas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang selanjutnya.

Begitu pun dalam musrenbang kecamatan, berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika mengikuti musrenbang kecamatan Idi Tunong tanggal 21 Februari 2012, daftar usulan dari 25 desa serta dinas/instansi sudah masuk seminggu sebelum pelaksanaan musrenbang kecamatan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kabupaten merupakan rumusan elite kecamatan berdasarkan daftar usulan dari masing-masing desa dan dinas/instansi. Hal ini dapat dilihat ketika proses musrenbang kecamatan tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang, karena daftar usulan kegiatan sebagai hasil musrenbang kecamatan yang akan diusulkan ke kabupaten sudah di *printout* oleh pihak kecamatan.

Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta musbangdes bahwa kehadiran peserta dalam musbangdes tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan pak Keuchik saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar. Ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang musbangdes tidak bisa hadir dan mewakilkannya pada orang lain yang kurang memahami perencanaan pembangunan. Sehingga

mereka tidak mengajukan usulan, tidak memberikan masukan dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Mereka terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada Kades untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Waktu bagi penyelenggaraan musbangdes sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat. Musbangdes dimulai jam 13.52 WIB sampai dengan jam 16.30, berarti waktu yang dialokasikan hanya 2 jam 38 menit, sempitnya waktu menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Hal menarik lainnya adalah proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat peserta Musrenbang terhadap perencanaan pembangunan, berikut hasil wawancara dengan peserta musrenbang dari salah-satu Desa dalam Kecamatan Idi Tunong *“Baru kali ini saya ikut musbangdes, saya nggak tahu bagaimana proses musbangdes itu seperti*

Tabel 1.1

**Jadwal Pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat Desa sampai nasional**

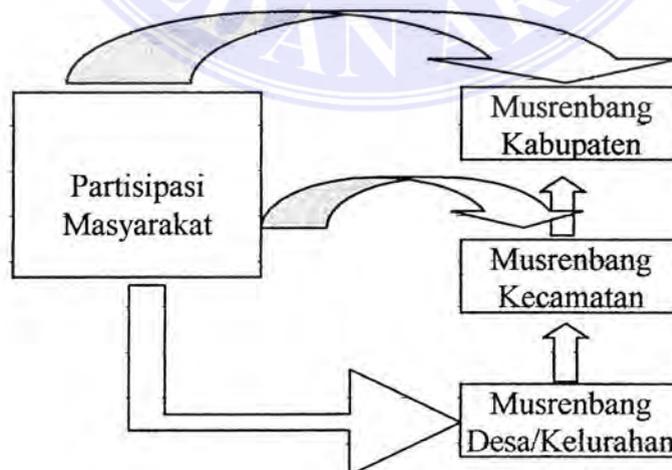
No.	Tingkatan Musrenbang	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Desa	V	V										
2	Kecamatan			V									
3	Kabupaten			V									
4	Provinsi				V								
5	Nasional					V							

Sumber: Bappeda kabupaten Aceh Timur

Proses perencanaan pembangunan tingkat Desa diselenggarakan antara akhir Januari dan awal Februari, Proses perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan Maret antara minggu pertama dan kedua, tingkat Kabupaten bulan Maret antara minggu ketiga dan keempat, tingkat Provinsi Bulan Mei, sedangkan di tingkat Nasional diselenggarakan pada Bulan Mei.

Adapun Model Sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

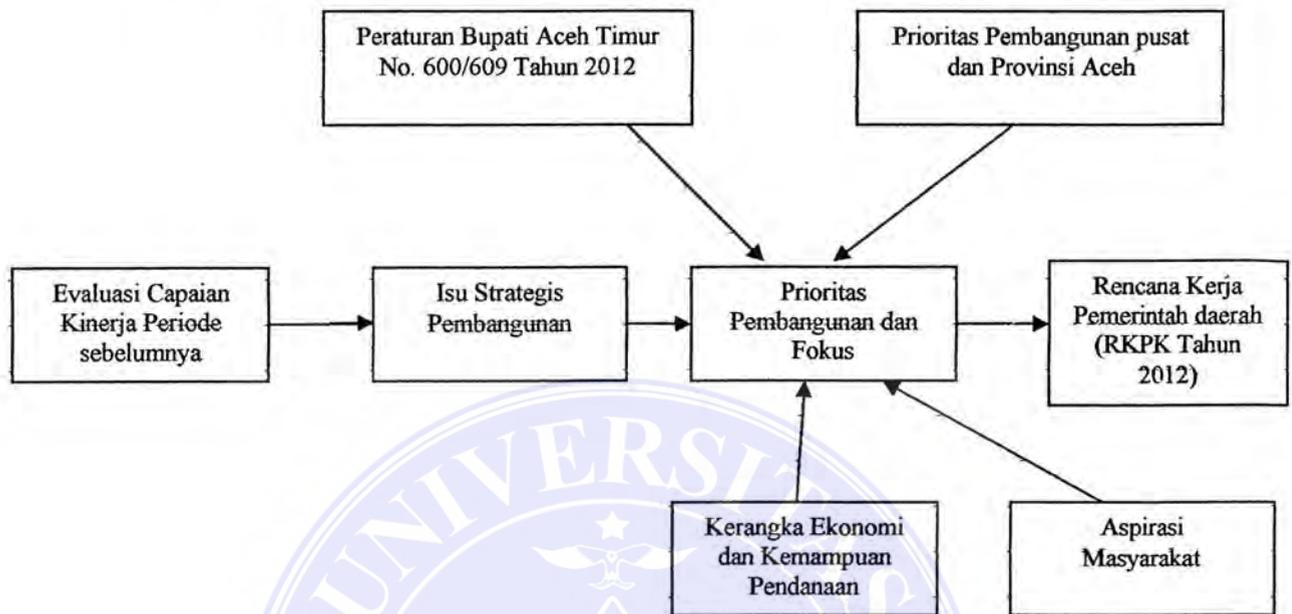
Gambar 1.3  
**Model Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Aceh Timur**



Prioritas pembangunan daerah yang menjadi sasaran penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD 2012-2017 dengan memperhatikan isu strategis atau isu kebijakan pembangunan. Selain itu penentuan prioritas pembangunan memperhatikan pula capaian kinerja periode sebelumnya, kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten, prioritas pembangunan Provinsi Aceh dan pemerintah Pusat maupun aspirasi masyarakat/kebutuhan pembangunan yang telah diidentifikasi selama proses pelaksanaan Musrenbang, sehingga pada akhirnya berakumulasi menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci ke dalam program/kegiatan pembangunan, maka pada masing-masing prioritas pembangunan dilengkapi dengan fokus-fokus program, sehingga intervensinya menjadi terarah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proses penetapan prioritas pembangunan dalam RKPK Tahun 2012 dilakukan berdasarkan bagan alir berikut.

Gambar 1.4

Proses penetapan prioritas pembangunan Daerah kabupaten Aceh Timur



Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut:

### **A. Prioritas Utama:**

1. Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah.
2. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial.
5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sector unggulan daerah.
6. Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi.
7. Pengembangan sentra-sentra agro industri.

### **B. Prioritas Penunjang**

8. Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah.
9. Peningkatan peran seerta masyarakat dalam pembangunan.
10. Peningkatan infra struktur

### **C. Prioritas Khusus**

11. Pemekaran wilayah.

(Sumber; RPJMD Kabupaten Aceh Timur 2012-2017)

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Aceh Timur terbagi atas:

1. Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Panjang

Hal-hal tersebut di atas merupakan gambaran awal dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong

Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.

### **1.2. Perumusan Masalah**

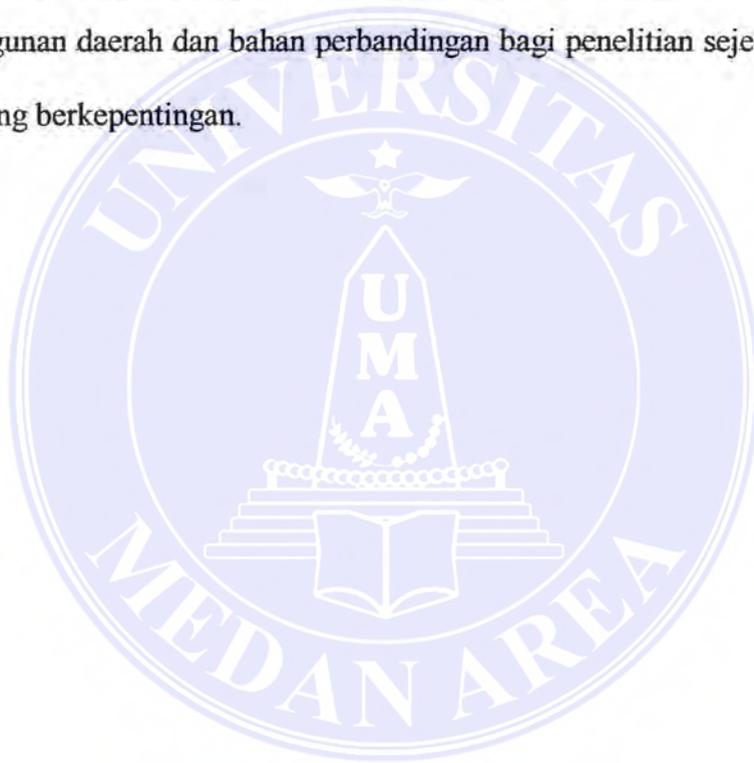
1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Aceh Timur.
2. Sebagai bahan masukan agar lebih terarah dan pencapaian sasaran Pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh Masyarakat banyak.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation building*)”. Adapun Ginanjar Kartasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi *multi interpretable* namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) *Live sustenance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) *self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *freedom for survitude*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman (Jtokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk

menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat member hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

## 2.2. Perencanaan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelegensi guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesis bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang, mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapat bahwa perencanaan

adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh Malayu S.P. Hasibuan (1988) diantaranya: George R Terry mengatakan perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. T hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan

(tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O'Donnel, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, proigram-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Louis A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ada 6 langkah atau proses perencanaan, yaitu:

#### 1. Perumusan tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumber dayanya secara tidak efektif.

#### 2. Perumusan masalah

Kegiatan ini sangat penting, hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

#### 3. Melakukan analisa

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

#### 4. Pengembangan alternatif

#### 5. Pemilihan alternatif

yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

#### 6. pengembangan rencana derivatif

### 2.3. Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1981: 3) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: "suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai caracara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang".

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk

mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Menurut Diana Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam

hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia telah diterapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan dari atas (*top down approach*). Terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes), Diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) di Tk Kecamatan, rapat koordinasi pembangunan (rakorbang)

di Tk Kabupaten/Kota, rakorbang Tk Provinsi, konsultasi regional pembangunan (konregbang), dan konsultasi nasional pembangunan (konasbang).

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

#### **2.4. Partisipasi masyarakat**

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan

yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

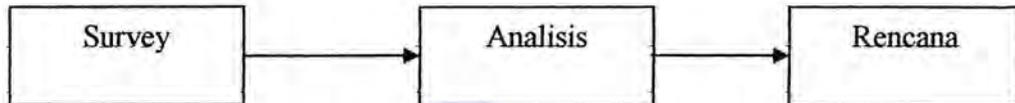
Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "*partisipasi*" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencanarencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam

memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut:

Gambar 2.1

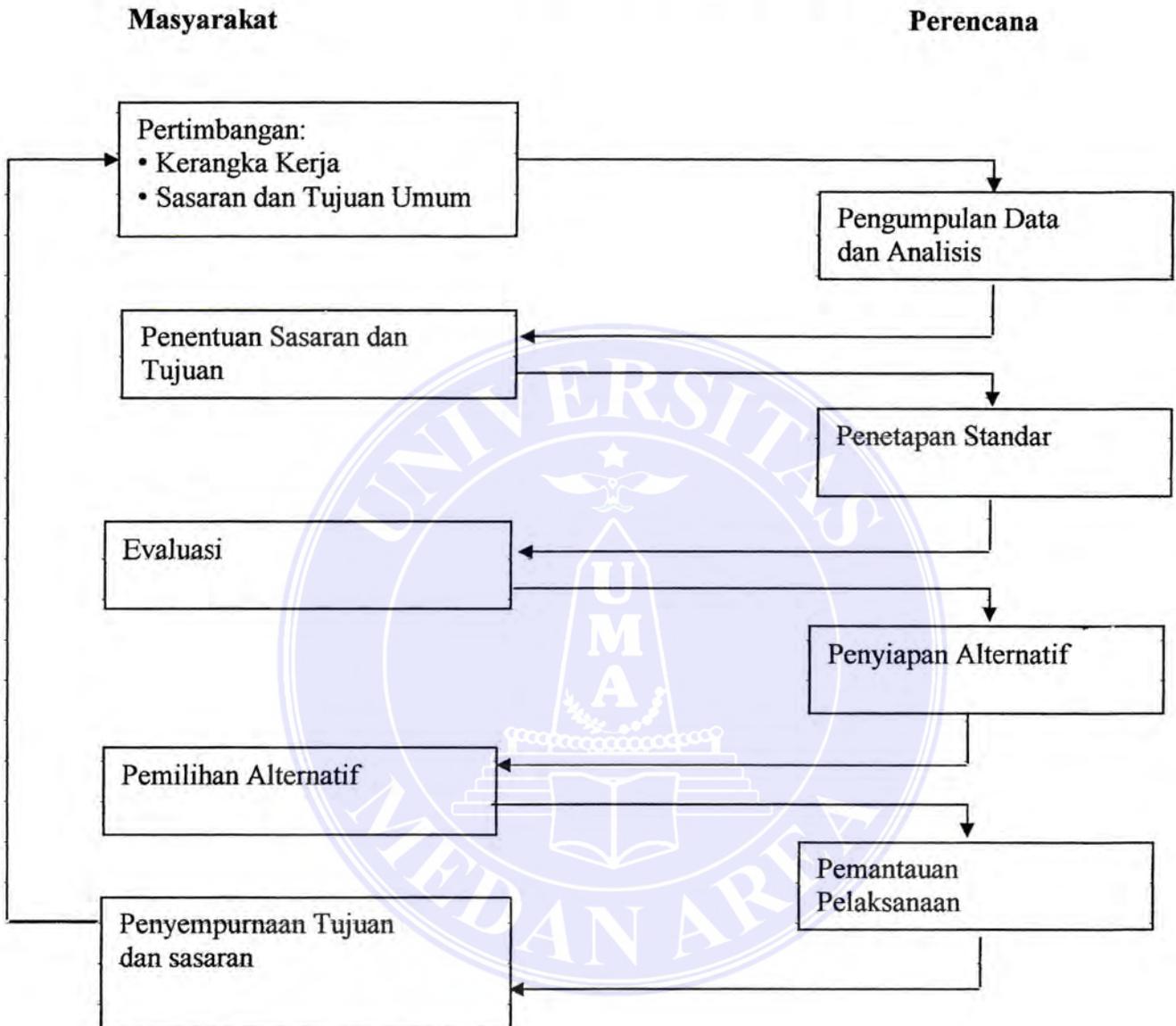
Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan



Sumber: Geddesian dalam Soemarmo

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Robert pada dasarnya sependapat dengan geddesian. Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif menurut Robert dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2  
Peluang Partisipasi Masyarakat dalam  
Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program



Sumber: Robert (dalam Soemarmo, 2005)

Berdasarkan gambar di atas, partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program sementara penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan dilakukan secara bersama dengan perencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara masyarakat dan perencana menurut Mc Connel (dalam Soemarmo, 2005) merupakan input sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

*Pertama*, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

*Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen

partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control* (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

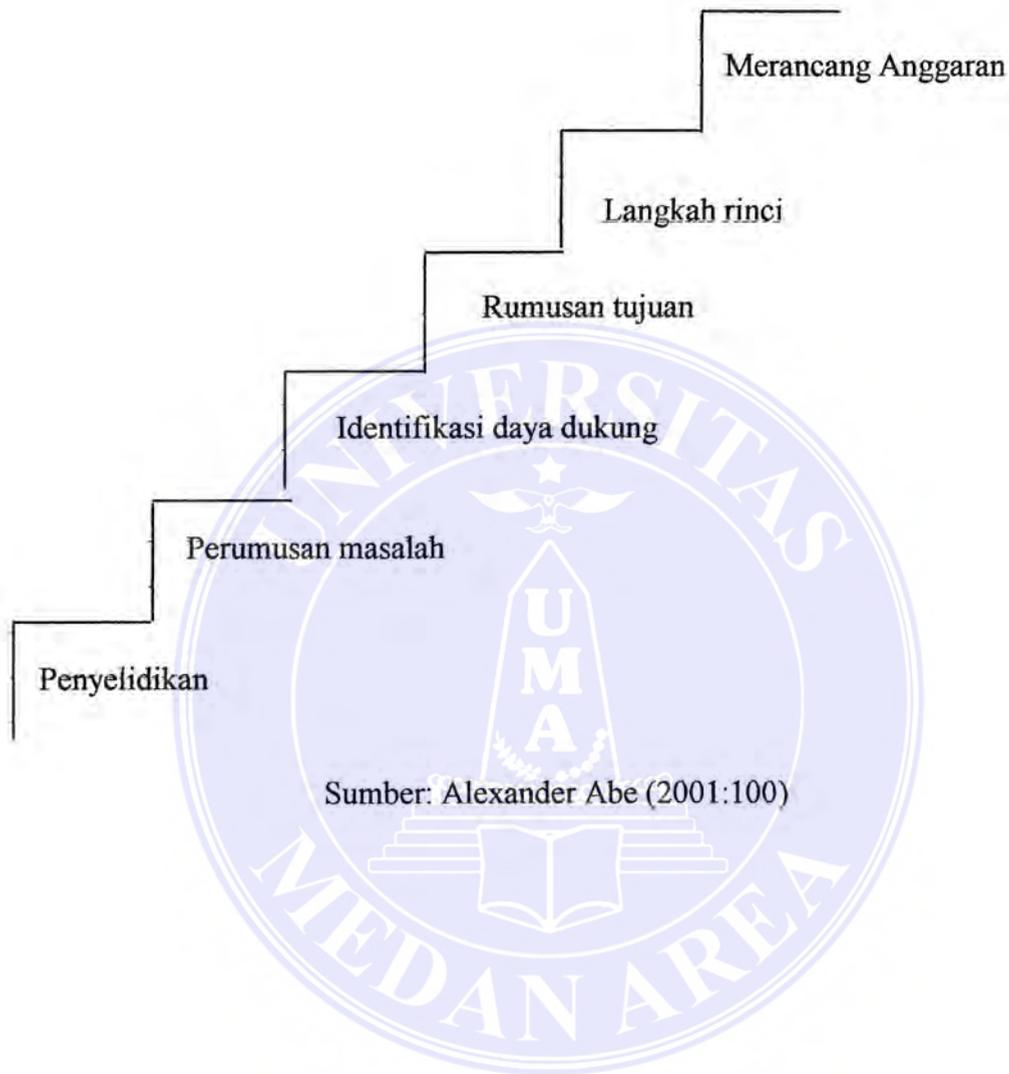
Alexander Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut:

“perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.”

Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Langkah-langkah perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah



Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan Tujuan Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.
5. Langkah rinci Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.
6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen (2001:64) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi

35

mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto (1984:35), “partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorban kepentingan diri sendiri”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Rumusan FAO dan pandangan Mubyarto di atas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan.

Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing..

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Bintoro bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Pandangan Bintoro di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program

yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, (Siagian, 1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsure masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternative mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsure pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi

perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

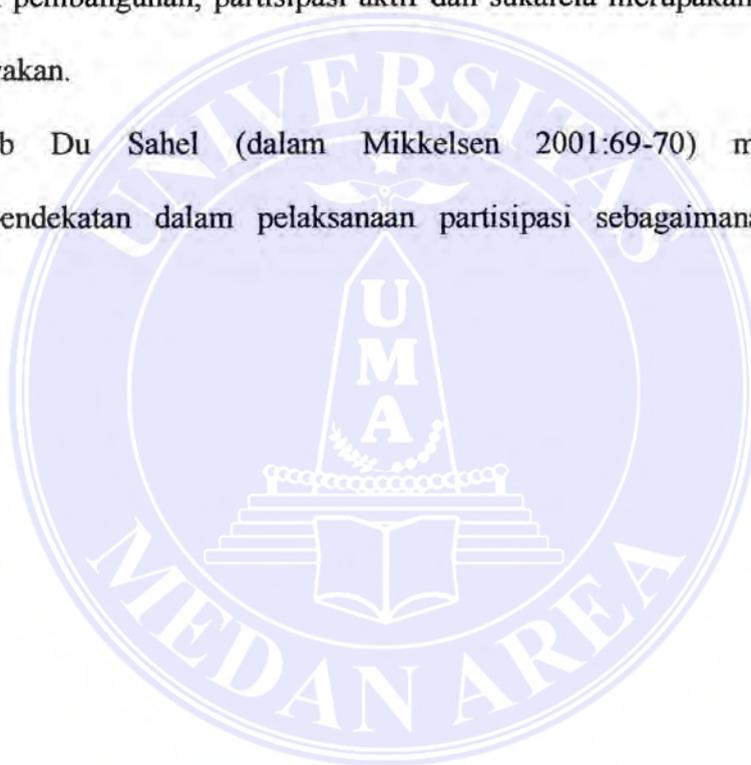
- a. Tahap Assesment
- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Dilain pihak Mikkelsen (2001:65), menyebutkan bahwa secara garis besar ada 2 pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu: (1) partisipasi datang dari masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. Namun demikian sedikit saja masyarakat yang mau melakukan pendekatan partisipasi secara sukarela dalam

kegiatan pembangunan; (2) partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Dengan pendekatan ini masyarakat dipaksa untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan dengan motivasi agar dapat melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan secara lebih baik. Selanjutnya disebutkan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan dengan tingkat paksaan dan sukarela yang berbeda-beda, serta tingkat keaktifan masyarakat yang berbedabeda pula. Namun demikian, guna mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi aktif dan sukarela merupakan hal ideal yang harus diupayakan.

Club Du Sahel (dalam Mikkelsen 2001:69-70) mendeskripsikan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan partisipasi sebagaimana dalam tabel berikut:



Tabel 2.1  
Pendekatan-pendekatan Partisipasi Club Du Sahel, 1988

No.	Jenis Partisipasi	Pendekatan	Keterangan
1	Partisipasi pasif, pelatihan dan informasi.	Pendekatan “kami lebih tahu apa yang baik bagimu”.	Komunikasi satu arah seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat.
2	Partisipasi Aktif	Pendekatan “pelatihan dan Kunjungan”.	Dialog dan komunikasi 2 arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dari luar.
3	Partisipasi dengan keterikatan	Pendekatan “kontrak, tugas yang dibayar”. Bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya: dapat

			dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.
4	Partisipasi atas permintaan setempat.	Kegiatan yang didorong oleh permintaan	Kegiatan yang brefokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal: tidak ada sasaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya: bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi.

Sumber: Club Du sahel (dalam Mikkelsen, 2001:69-70)

Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.

- a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
- b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

## 2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

## 3. Dinamis

- a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

## 4. Sinergitas

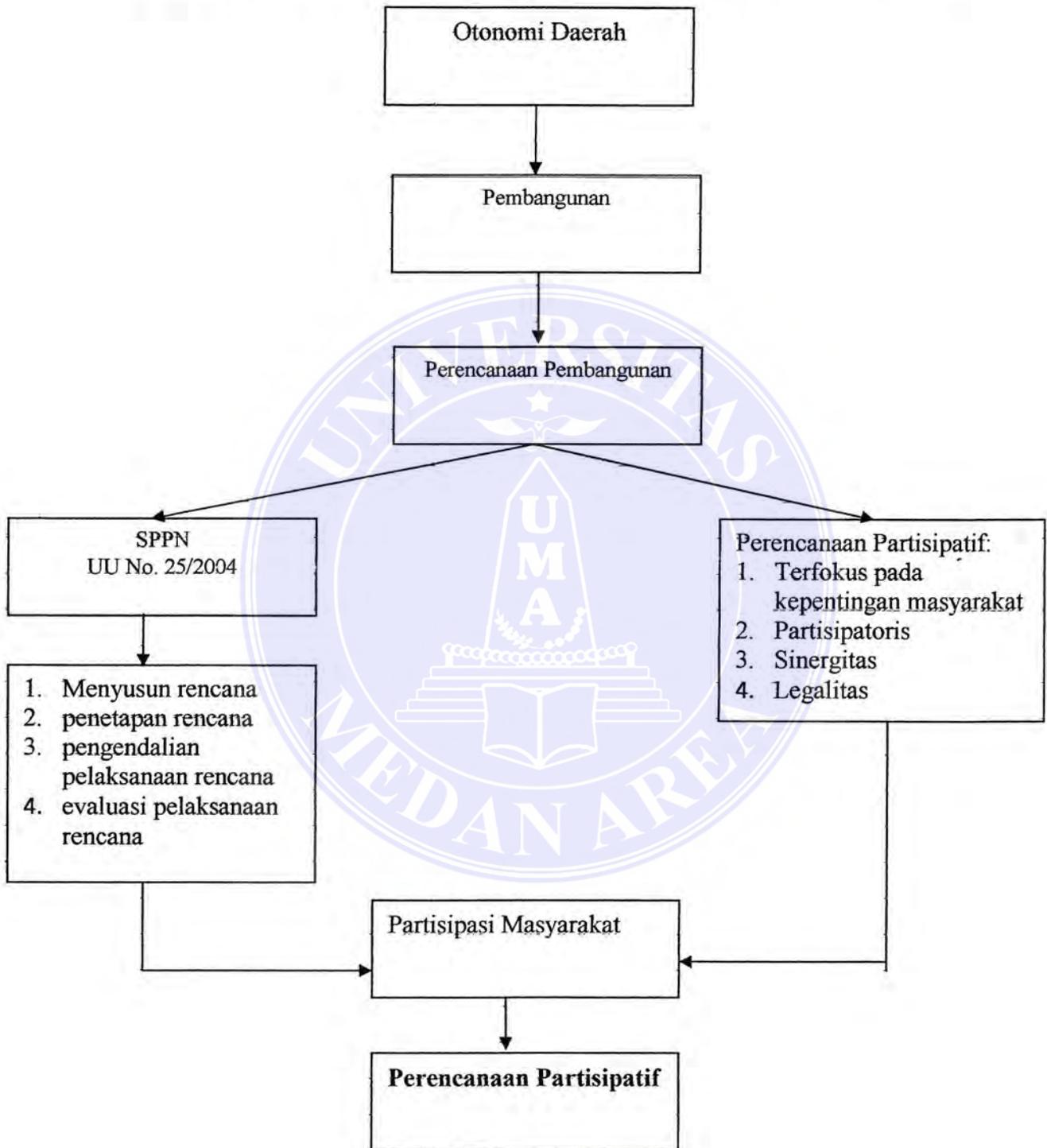
- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi diantara *stakeholders*.

## 5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang
- d. dan kekuasaan.

Gambar 2.4

Kerangka pikir studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

### 3.2. Fokus Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Nasution, 1992:31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya Masalah yang akan teliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah penulis berada dalam lapangan. Fokus itu masih mungkin mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian.

Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas. Fokus penelitiannya adalah studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.

### 3.3. Fenomena Pengamatan

Fenomena pengamatan dalam penelitian ini dikembangkan dari pengertian perencanaan partisipatif yaitu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

Adapun fenomena pengamatan dalam penelitian ini adalah:

1. Terfokus tidaknya perencanaan pada kepentingan masyarakat dilihat dari:
  - a. Apakah perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
  - b. Apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

## 2. Partisipasi masyarakat dilihat dari:

- a. Apakah masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran.
- b. Apakah masyarakat mengalami hambatan terkendala waktu dan tempat dalam memberikan sumbangan pemikiran.
- c. Apakah masyarakat ikut memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang yang lebih tinggi.

3. **Sinergitas perencanaan dilihat dari:** Apakah selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta terdapat interaksi diantara *stakeholders*.

4. **Legalitas perencanaan dilihat dari :** Apakah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

### 3.4. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2006:132). Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Bogdewic dalam Budi Puspo). Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Bernard dalam Budi Puspo).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara

purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu (Breg, Guba dan Lincoln dalam Fitriastuti, 2005:75).

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Bappeda sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur.
2. Camat Idi Tunong.
3. Perangkat Kecamatan
4. Kepala Desa
5. Perwakilan Masyarakat

### **3.5. Instrumen Penelitian**

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong cirriciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

Adapun alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat Bantu lainnya.

### **3.6. Pengumpulan Data**

#### **1. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur Bappeda, Camat Idi Tunong, Perangkat Kecamatan, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Perwakilan dari Masyarakat/stakeholders (LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita/PKK) yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

#### **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara semi struktur**

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya (Sugiyono).

## 2. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

## 3.7. Analisa Data

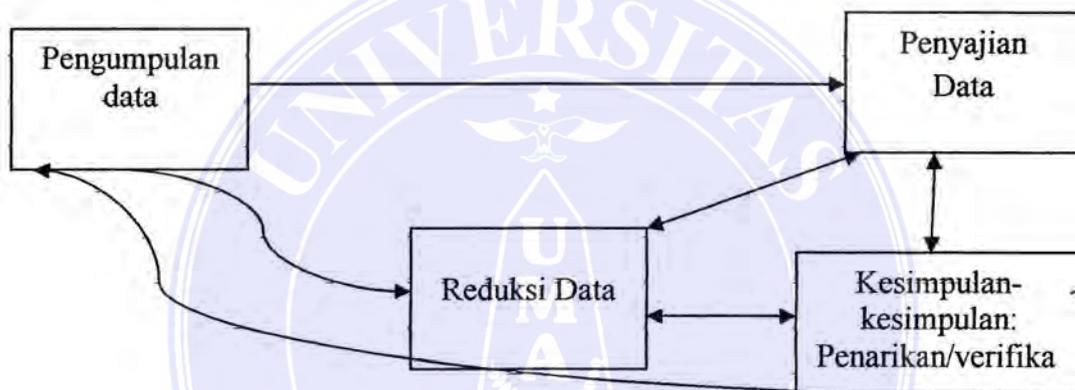
Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (1992:16).

Gambar 3.1

Analisis data model interaktif



Sumber: Milles dan Huberman

Gambar di atas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

### 1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

### 2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan idi Tunong Kabupaten Aceh Timur dapat diketahui dengan mudah.

### 3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data

pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Latar Belakang Kecamatan

Kecamatan Idi Tunong merupakan salah satu dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2000, tanggal 13 Juni 2000 M/21 Rabiul Awal 1421 H.

Kuta Baro merupakan Ibu Kota dan Pusat Pemerintah Kecamatan Idi Tunong terletak pada arah Utara-Selatan  $\pm 12$  Derajat sd  $\pm 75$  Derajat Lintang Utara dan pada arah Timur-Barat  $\pm 105$  Derajat s/d  $\pm 55$  Derajat Bujur Timur dan mempunyai Jarak  $\pm 12$  Km kearah Utara dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur atau  $\pm 375$  Km kearah Barat dari Ibu Kota Provinsi Aceh-Kota Banda Aceh. Dengan Titik kordinat : LU :  $04^{\circ}47'45,94''$  –  $04^{\circ}57'25,13''$ . BT :  $97^{\circ}41'54,05''$  –  $97^{\circ}45'09,46''$ .

Wilayah kerja Kecamatan Idi Tunong meliputi 1 Kemukiman yaitu Kemukiman Blang SiGuci dengan 25 Gampong dan 67 Dusun mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- = Sebelah Utara dengan Kecamatan Darul Aman ;
- = Sebelah Timur dengan Kecamatan Darul Ihsan, Idi Timur dan Peudawa;
- = Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banda Alam ;
- = Sebelah Barat dengan Kecamatan Idi Rayeuk ;

Kantor Camat Idi Tunong merupakan salah satu perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas penyambungan pembangunan dari kabupaten untuk kecamatan dalam bidang infrastruktur atau sarana dan prasarana lainnya, memiliki

keterkaitan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah maupun sosial kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan rencana pembangunan daerah (Kecamatan Idi Tunong).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan nyata masa yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional sebagai mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan :

1. Rencana pembangunan jangka panjang
2. Rencana pembangunan jangka menengah
3. Rencana pembangunan tahunan

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu pada Revisi RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2017. Revisi Renstra ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Idi Tunong secara bertahap selama 5 (lima) tahun agar lebih terarah dan berkesinambungan.

Renstra Kantor Camat Idi Tunong memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan diaktualisasikan oleh seluruh elemen, khususnya Pemerintah Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Idi Tunong Tahun 2012-2017 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Aceh Timur di Kecamatan Idi Tunong dalam rangka "**Membangun tatanan kehidupan masyarakat Aceh Timur yang Islami, bermartabat, adil, dan demokratis berlandaskan UUPA sebagai wujud implementasi MoU Helsinki untuk Kesejahteraan seluruh rakyat Aceh Timur**". Dari Visi tersebut diatas maka Terwujudnya Masyarakat Idi Tunong yang Makmur, Sejahtera, Mandiri dan Islami”

#### 4.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kantor Camat Idi Tunong merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Qanun nomor 5 tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur, tugas pokok Camat Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di kecamatan, Gampong, dusun, permukiman dan pengairan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Mendukung terlaksananya otonomi daerah, pemerintah berperan sebagai jembatan atau perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dalam hal ini Kecamatan-kecamatan dalam Daerah adalah perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana teknis ke-wilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal melaksanakan sebagian kewenangan untuk menangani urusan otonomi daerah diwilayah Kecamatan, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Tugas Camat adalah : Memimpin dan Membina Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan Administrasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bupati untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya di daerah, Camat Idi Tunong mempunyai fungsi :

1. **Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman.**
  - Mempelajari rencana sebagai petunjuk kerja
  - Merencanakan kegiatan Operasional
  - Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
  - Menetapkan rencana kegiatan untuk di desa
2. **Membagi tugas kepada bawahan sesuai Kasi maing-masing agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar;**
  - Memberikan informasi kegiatan kepada bawahan.
  - Membimbing bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan.
  - Memeriksa tugas yang telah dikerjakan bawahan.
  - Mengarahkan hasil pekerjaan bawahan.
3. **Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;**
  - Mengadakan rapat dengan para Kasi – kasi.
  - Menugaskan bawahan sesuai fungsi jabatannya.
  - Mengarahkan Kinerja pelaksanaan kegiatan Kasi.
  - Memberikan solusi terhadap masalah yang timbul.
4. **Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;**
  - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - Mengkoordinir Pembinaan pemerintahan gampong.
  - Mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

5. **Mengatur pelaksanaan kebijakan umum sesuai ketentuan dalam Kecamatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;**
  - Menetapkan peraturan kepada bawahan
  - Melaksanakan Apel pagi,siang dan sore
  - Menetapkan penerapan disiplin terhadap Pegawai Kecamatan.
  - Menandatangani setiap surat-surat yang diperlukan
  - Menetapkan kebijakan untuk menjaga sarana dan prasarana kantor
  - Menetapkan pelayanan administrasi masyarakat sebaik mungkin
  - Mengeluarkan surat keterangan, rekomendasi dan surat izin lainnya.
  
6. **Mengkoordinir suatu desa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Desa Binaan;**
  - Memilih desa yang akan menjadi penilaian
  - Mengkoordinir geucik untuk kelestarian desanya
  - Memberikan pengarahan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan, keindahan, kerapian bersama.
  
7. **Mengkoordinir pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor;**
  - Mengkoordinir pemeliharaan Penggunaan Peralatan Kantor;
  - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Kantor dalam melayani masyarakat;
8. **Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan hari Nasional di Kecamatan;**
  - Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang diadakan MTQ.
  - Bekerjasama dengan Aparatur Desa dalam merayakan hari Kemerdekaan R.I.
  
9. **Menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah;**
  - Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
  - Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendayaagunaan aparatur Negara.
10. **Mengawasi kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di Kecamatan;**
- Mengawasi kegiatan pembuatan dan pembagian E-KTP.
  - Mengkordinir Pelayanan Raskin terhadap masyarakat.
  - Mengkoreksi proposal-proposal permohonan bantuan dari masyarakat.
  - Mengkoordinir pelayanan dana bantuan terhadap fakir miskin, anak yatim dari bagian Sosial Sekdakab Pemerintah Kabupaten aceh Timur.
11. **Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;**
- Memotivasi bawahan terhadap hasil pekerjaan yang dicapai.
  - Memberi kesempatan maju kepada pegawai yang berkarier.
12. **Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diintruksikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;**
- Melaksanakan tugas dinas Rapat koordinasi seluruh Camat di luar Daerah
13. **Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.**

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Idi Tunong yang merupakan Kecamatan termuda, harus diakui sekarang ini belum dan tidak memiliki Supra dan

Inpra Struktur yang belum memandai. Kondisi ini tentunya dapat menghambat jalannya Roda Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Namun demikian mekanisme kerja Pemerintah Kecamatan Idi Tunong tetap bergerak secara aktif didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menurut fungsi dan kewenangan masing-masing serta tetap mengadakan Koordinasi dengan baik.

#### **4.1.2.Pemerintah Gampong**

Kecamatan Idi Tunong dengan 1 Kemukiman, yaitu; Kemukiman Blang si guci dan kemukiman Persiapan 25 Gampong dan 75 Dusun sebagai bawahan, Gampong - gampong tersebut adalah :

1. Alue Lhok
2. Padang Kasah
3. Seuneubok Buya
4. Paya Awee
5. Paya Gaboh
6. Seuneubok Drien
7. Keude Keumuneng
8. Gampong Keumuneng
9. Seuneubok Meureudu
10. Seuneubok Punti
11. Seuneubok Dalam
12. Seuneubok Jalan
13. Buket Teukuh
14. Keumuneg Lhok
15. Buket Rumia
16. Alue Kumbang – M
17. Alue Kumbang – B
18. Seuneubok Baro
19. Buket Pu,uk
20. Seuneubok Buloh
21. Blang Minjee
22. Blang Guci
23. Bantayan Barat
24. Seuneubok Teupin Panah
25. Gampong Teupin Panah

### 4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

Dalam Struktur Organisasi, Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah, maka Kecamatan dan Camat Idi Tunong didalam menjalankan peran tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah dan berada dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan.

Peran dan Tugas Pokok Camat Idi Tunong selama ini adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati Aceh Timur selaku Administrator Pemerintah dalam Wilayah Kecamatan Idi Tunong;
- b. Membantu Bupati Aceh Timur selaku Administrator Pembangunan dalam Wilayah Kecamatan Idi Tunong
- c. Membantu Bupati Aceh Timur selaku Administrator Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan Idi tunong

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Idi Tunong berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2005, maka Camat Idi tunong mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain sebagai berikut :

#### 1. CAMAT

##### 1.1. Tugas Pokok Camat :

- a. Memimpin dan membina Kecamatan dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten ;
- b. Menyiapkan Kebijakan Umum dibidang Pemerintah Kecamatan ;
- c. Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat ;
- d. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;

- f. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sasaran dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum;
- g. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan ;
- h. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong ;
- i. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan ;
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang Tugasnya.

### **1.2. Fungsi Camat :**

- a. Menyusun Visi, Misi, Program dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan ;
- b. Melakukan Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintah ;
- c. Mengadakan Pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan Masyarakat ;
- d. Mengadakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan
- e. Mengadakan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat ;
- f. Mengadakan Pembinaan Administrasi serta Pelayanan Tekhnis Administrasi kepada seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan ;
- g. Mengadakan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
- h. Mengadakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- i. Membuat Laporan Hasil tugas kepda Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat Kecamatan**

- a. Sekretariat adalah Unsur Pembantu Pimpinan dibidang Pembinaan dan Pengelola Administrasi;
- b. Sekretaris dipimpin oleh seorang “Sekretaris Kecamatan” yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **2.1. Tugas Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai Tugas ; Melakukan Pembinaan dan Pengelola Administrasi Umum, Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian, Penataan Arsip, Organisasi dan Tatalaksana hubungan Masyarakat serta melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Strategis, Program Kerja, Evaluasi dan Pelaporan serta Pelayanan Administrasi kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan.

### **2.2. Fungsi Sekretariat kecamatan :**

Untuk Menyelenggarakan Tugas sebagaimana maksud Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Penataan Arsip dan Dokumentasi serta Organisasi dan ketatalaksanaan ;
- b. Melakukan Penyusunan Rencana Srategis Jangka Pendek dan Jangka Panjang serta Pengkajian dan Evaluasi secara berkala ;
- c. Melakuka Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan, Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ;
- d. Melakukan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan ;
- e. Melakukan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ;

- f. Melakukan Penyiapan Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan Bidang Tugasnya.

### 2.3. Sekretariat Kecamatan Terdiri dari:

- a. Subbagian Umum ;
- b. Subbagian, Keuangan ;
- c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan

Masing - masing subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- a. **Subbagian Umum** : mempunyai Tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang meliputi Surat Menyurat, Penataan Arsip, Pegawai, Mutasi Pegawai, Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Ketatalaksanaan dan Hubungan Masyarakat ;
- b. **Subbagian Keuangan** : mempunyai Tugas Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang meliputi Penyusunan Anggaran, Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung. Verifikasi, Mempersiap Konsep SPM, Pembukuan, Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan ;
- c. **Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** : mempunyai Tugas Mengumpulkan dan Mempersiapkan Bahan, Data untuk Penyusunan Perencanaan Program kerja dan Kegiatan, Rencana Strategis, Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Melakukan Pengendalian dan Pelaporan serta Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

### 3. Kasi Tata Pemerintahan :

- a. Kasi Tata Pemerintah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Dibidang Tata Pemerintah
- b. Kasi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat sesuai Bidang Tugasnya.

### **3.1. Tugas Kasi Tata Pemerintahan :**

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas membantu Camat dalam menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan, Melaksanakan Urusan Tata Pemerintahan, Pembinaan Pengawasan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong, Administrasi Pertahanan / Keagriaan Administrasi Kependudukan dan Melakukan pengumpulan Bahan, Mengadakan Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Kecamatan.

### **3.2. Fungsi Kasi Tata Pemerintahan :**

- a. Menyiapkan rencana / program kerja penyelenggaraan pembinaan pemerintahan gampong, Pertahanan dan Administrasi Kependudukan;
- b. Mengadakan Pembinaan Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi tugas Pemerintah ;
- d. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas ;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Kasi pemberdayaan masyarakat dan gampong :**

- a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Unsur Pembantu Pimpinan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ;
- b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawa kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4.1. Tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong :**

Membantu Camat dalam merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Program dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat, Menyelenggarakan Pelayanan Teknis Administrasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Melaksanakan Pengawasan Penyusunan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Produksi, Distribusi, Transportasi Barang dan Jasa, Mengadakan Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong di Kecamatan.

#### **4.2. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong :**

- a. Menyiapkan Rencana/Program Kerja dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat ;
- b. Mengadakan Pembinaan Lingkungan Hidup ;
- c. Menyusun bahan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dibidang Pembangunan Masyarakat ;
- d. Menyiapkan Rencana/Program Kerja dan Pembinaan, Pelayanan vdan Bantuan Kesejahteraan rakyat ;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum :**

- a. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur Pembantu pimpinan dibidang ketentraman dan ktertiban Umum ;
- b. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5.1. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :**

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan Bahan perumusan Kebijakan, Melaksanakan Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum, Melakukan Upaya Pembinaan terhadap Masyarakat serta

70

melakukan Pengumpulan Bahan, Mengadakan Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

## **6. Kasi Keistimewaan Aceh :**

- a. Kasi Keistimewaa Aceh adalah Unsur Pembantu Pimpinan di Bidang Penyelenggaran keistimewaan Aceh ;
- b. Kasi Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **6.1. Tugas Kasi Keistimewaan Aceh :**

Memimpin, Mengatur, mengawasi, mengkoordinir kegiatan Penyusun Program dan melaksanakan Pembinaan keistimewaan Aceh.

### **6.2. Funsii Kasi Keistimewaan Aceh :**

- a. Menyiapkan Rencana/Program kerja dan Pembinaan serta Pelayanan Keistimewaan Aceh ;
- b. Melakukan Pembinaan Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan Aceh ;
- c. Melakukan Pembinaan Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Qanun Aceh ;
- d. Mengadakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas ;
- e. Mengadakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai denga bidang tugasnya.

## **7. Kasi kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga :**

- a. Kasi kesejahteraan Sosial, Pemuda dan olah Raga adalah Unsur pembantu Pimpinan dibidang kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga ;
- b. Kasi Kesejahteraan sosial, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang kepala Kasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat sesuai dengan bidang dan tugasnya.

### **7.1. Tugas Kasi Kesejahteraan sosial Pemuda dan Olah Raga :**

- Kasi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas membantu Camat dan merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Program dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Menyelenggarakan Pelayanan Teknis Administrasi dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan serta Kesehatan, Melaksanakan Pengawasan, Menyusun Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dibidang Sosial, Pemuda , Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan serta Kesehatan, Mengadakan Evaluasi dan Pelaporan serta Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya di Kecamatan.

### **7.2. Fungsi Kasi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga :**

- a. Menyiapkan Rencana/Program Kerja dan Pembinaan, Pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga ;
- b. Mengadakan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Menyusun bahan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Olah Raga Aceh ;
- d. Menyiapkan Bahan Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Olah Raga Aceh ;
- e. Mengadakan Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan Tugas ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh

Timur belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Alue Lhok, Padang Kasah, Seuneubok Buya, dan Paya Awee.
- b. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, Alue Lhok, Padang Kasah, Seuneubok Buya, dan Paya Awee penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Alue Lhok.

##### 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Idi Tunong

Kabupaten Aceh Timur masih rendah, dengan uraian sebagai berikut :

124

- a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh di 4 desa yaitu Alue Lhok, Padang Kasah, Seuneubok Buya, dan Paya Awee. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT, sebagian besar melakukan proses penyelidikan tersebut di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat rendah dalam kegiatan penyelidikan masalah kebutuhan masyarakat tingkat RT. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam kegiatan penyelidikan tingkat RT maupun dalam musrenbang Desa dan Kecamatan, karena kegiatan tersebut dilakukan di tingkat dusun dimana

perwakilan masyarakat saja yang hadir. Di tingkat musrenbang Desa, hanya perwakilan masyarakat yang hadir yaitu para ketua RW, Ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan belum mewakili unsure masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan di tingkat Kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

- c. Sinergitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Idi Tunong selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.
- d. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

## 6.2. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Referensi

- Abe, Alexander,, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariani, Dyah, dkk, *Bahan Ajar Manajemen Strategis dan Manajemen Pembangunan*
- Fitriastuti, NurwiMayasri, 2005, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasibuan, Malayu, S.P.Drs, 1993, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah CV*, Haju Masagung, Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Michael, Todaro, 1977, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.

- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung. Nazir, Muhamad, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- ReksoPutranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.

### Daftar Bacaan

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj tertanggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.
- Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 Tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timuri.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Aceh Timur 2012-2017